



RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang merupakan penjabaran dari tugas, fungsi dan program kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD tahun 2019–2024. Antara lain memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disertai dengan Rencana Kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang indikatif.

Akhirnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan review Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, Agustus 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG

ABD. HANNAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640804 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 5
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II - 1
2.2 Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah.....	II - 7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 16
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III - 2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPRKP Kab. Sampang.....	III - 3
3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan KLHS.....	III - 5
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III - 5
BAB IV Tujuan, dan Sasaran.....	IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV - 1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	V - 1
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	V - 1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI - 1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI - 1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII - 1
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	VII - 1
BAB VIII Penutup.....	VIII - 1

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah.....	I - 2
Bagan 2.1. Struktur Organisasi DPRKP Kab. Sampang.....	II - 6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Status dan Golongan.....	II - 7
Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II - 7
Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Status Eselon	II - 8
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP Kab. Sampang.....	II - 8
Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPRKP	II - 8
Tabel 2.4. Komparasi Perubahan Capaian Sasaran Renstra DPRKP terhadap Renstra Provinsi dan Renstra K/L	II - 16
Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III - 1
Tabel 3.1.2. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III - 2
Tabel 3.2.1. Telaahan Visi, Misi serta Permasalahan Pelayanan DPRKP	III - 2
Tabel 3.3.1. Permasalahan Pelayanan DPRKP berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 3
Tabel 3.3.2. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 4
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III - 6
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRKP Kab. Sampang.....	IV - 1
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 1
Tabel 5.2. Analisis SWOT dalam Peta Strategi DPRKP Kab. Sampang.....	V - 2
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPRKP 2013-2018.....	VI - 2
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sampang.....	VII - 1
Tabel 7.2. Keterhubungan Renstra DPRKP Kab. Sampang dengan RPJMD Kab. Sampang Tahun 2019-2024.....	VII - 2

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis dan Pendanaan Indikatif
2. Matrik Indikator Kinerja SKPD
3. Matrik Keterhubungan Renstra DPRKP Kab. Sampang dengan RPJMD Kab. Sampang TA. 2019-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

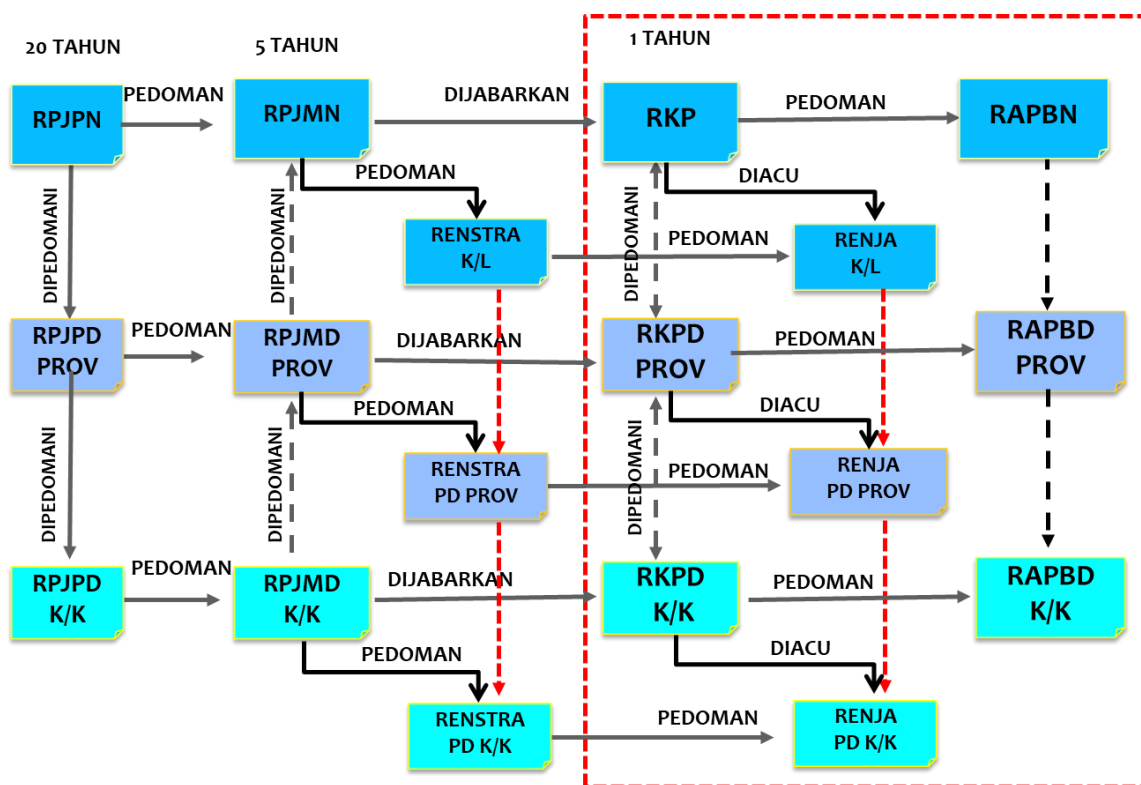
Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan

pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1 .

Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementrain Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang 2019-2024 adalah sebagai:

- 1) Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang.
- 2) Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan;
- 3) Dokumen acuan untuk mengkoordinasikan secara internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra,

keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2019-2024, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra 2019-2024, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada lahirnya Perbup No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

Secara umum kondisi internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kabupaten Sampang. Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Perbup No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hubungan masyarakat dan protokol.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi kawasan permukiman.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”);

- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan rekomendasi ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
- e. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan;
- f. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan;
- g. Pelaksanaan program pembangunan perumahan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- i. Perencanaan penataan bangunan;
- j. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pengelolaan gedung daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan;
- l. Pemberian rekomendasi ijin penghunian, persewaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan;
- m. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi dan pengelolaan pertanahan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pemberian rekomendasi izin penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- e. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten Sampang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pemberikan rekomendasi ijin sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pemeliharaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Kelembagaan dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 3. Seksi Pertanahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman;
 2. Seksi Penataan Lingkungan;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman.
 - e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Air Minum;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;

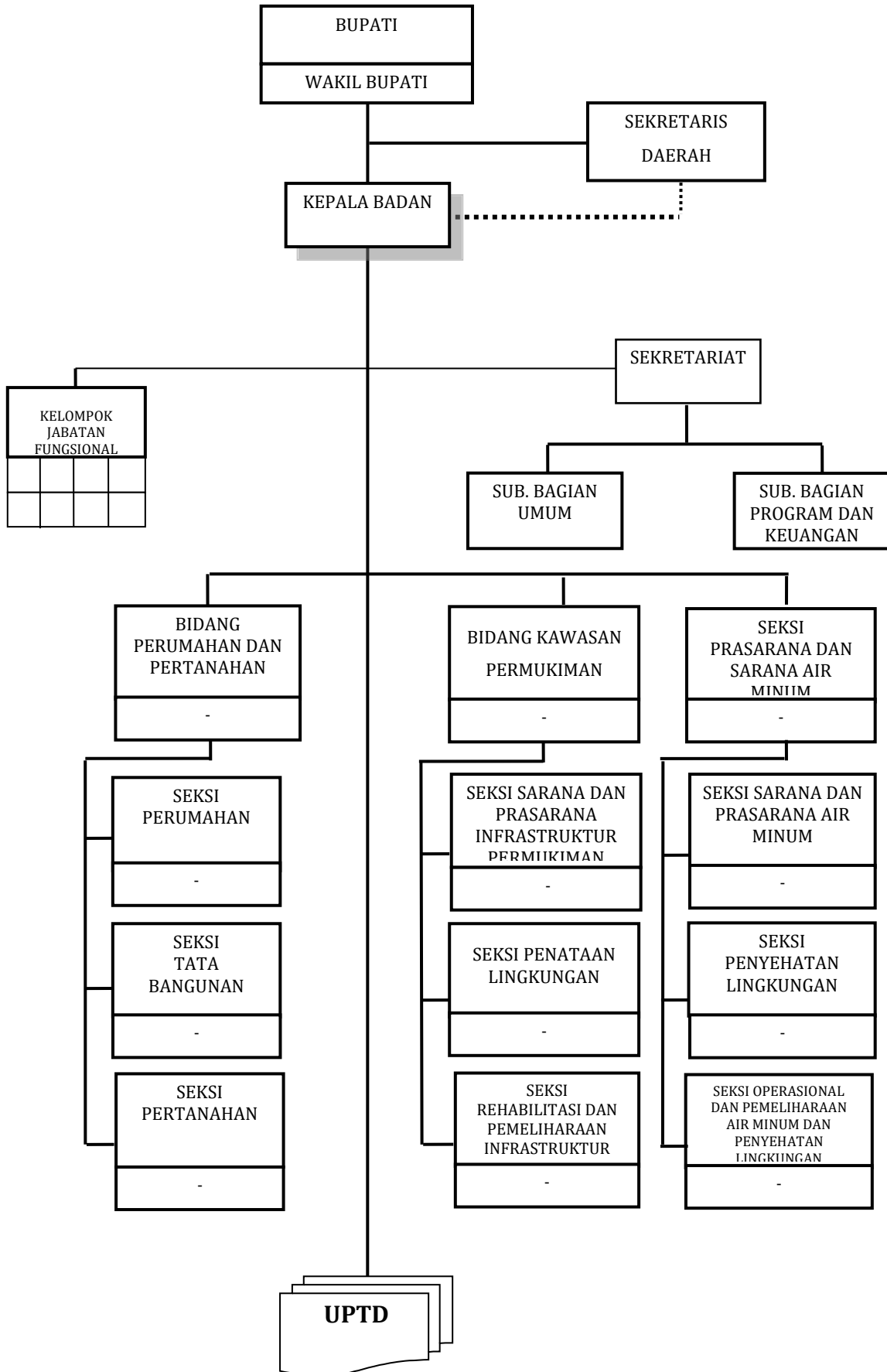
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Air Minum dan Kesehatan
Lingkungan Permukiman

- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang tertera sebagai berikut :

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sampang



Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai dinas teknis yang menangani urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang Pekerjaan perumahan dan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang pada tahun 2019 memiliki jumlah pegawai sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi dan tenaga magang sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Berikut tabel kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

Tabel 2.2.1.
PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS DAN GOLONGAN
TAHUN 2018 dan 2019

No	Golongan	TAHUN					
		2018	2019				
			A	b	c	d	Jml
1.	PNS						
	1). Golongan I	1	-	-	1	-	1
	2). Golongan II	5	-	1	2	1	4
	3). Golongan III	32	6	6	11	6	29
	4). Golongan IV	5	4	2	-	-	6
	Jumlah PNS	43					40
2.	Non PNS	17					17
	Jumlah Seluruhnya	62					57

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 2.2.2.
PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2018 dan 2019

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019
1.	SD	-	-
2.	SLTP	1	1
3.	SLTA	7	6
4.	Diploma II	-	-
5.	Sarjana Muda/ D III	1	1
6.	S-1	19	17
7.	Pasca Sarjana/ S-2	15	15
8.	S-3	-	-
	Jumlah	43	40

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 2.2.3.
JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS ESELON
AWAL TAHUN 2019

No	UNIT KERJA	Tingkat Pendidikan								JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2	S-3	
1.	Struktural									
	1 Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2 Eselon III	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	3 Eselon IV	-	-	-	-	-	4	5	-	9
2.	Staf PNS	-	1	6	-	1	12	6	-	26
3.	Staf Non PNS	-	1	1	-	-	15	-	-	17
	Jumlah	-	2	7	-	1	32	16	-	57

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang. Sarana dan prasarana pendukung di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang sampai saat ini cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Sarana Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Sampang tahun 2019

1. Kendaraan roda empat 6 buah
2. Alat berat wales 1 buah
3. Sepeda motor 37 buah
4. Laptop 20 buah
5. Notebook 10 buah
6. Komputer PC 9 buah
7. Printer 32 buah
8. DVD 3 buah
9. Televisi 1 buah
10. Rak Buku 2 buah
11. Microphone 3 Set
12. Mixer 1 buah
13. Finger Print 1 buah
14. Lux Meter 3 buah
15. Mesin gambar 1 buah
16. Materan laser digital 2 buah

17. Meteran dorong digital 3 buah
18. Digital clamp meter 2 buah
19. Dramond coredrill 1 buah
20. AC 13 buah
21. Sound System/speaker 4 unit
22. Camera Digital 4 buah
23. Proyektor 3 buah
24. Meja Rapat (Oval) 1 Set
25. Pesawat telepon 5 buah
26. Pesawat Faximile 1 buah
27. Brankas 3 buah
28. Kursi Lipat 122 buah
29. Rol Meter 6 buah
30. Filling Kabinet 8 buah
31. Lemari 17 buah
32. Meja 97 buah
33. UPS/Stavolt 1 buah
34. Teodolith 1 buah
35. GPS 9 buah
36. Tongkat ukur 1
37. Kursi Tamu 2 Set
38. Podium 1 buah
39. Kursi Tamu 1 buah
40. Kursi Putar 82 buah
41. Gedung kantor dan auditorium

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran Renstra periode sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase rumah layak huni;
2. Persentase permukiman kumuh;
3. Cakupan perumahan sehat;
4. Persentase RT berakses air minum;
5. Persentase RT berakses sanitasi;
6. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik;
7. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan.

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Renstra PD Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase rumah layak huni	√	√		61,92	63,76	65,76	47,67	48,62	49,59	47,61	47,67	47,67	47,67	47,68	47,71	76,89	74,76	72,49	100	98,07	96,21
2	Persentase permukiman kumuh	√	√		28,38	27,39	26,50	17,10	16,93	16,59	17,48	17,43	17,28	17,28	0,94	1,06	61,59	63,64	65,21	101,05	100	6,39
3	Cakupan perumahan sehat	√			-	26,50	26,50	45,00	16,00	20,00	-	12,47	12,47	14,55	16,00	37,33	-	47,06	47,06	32,33	100	186,65
4	% RT berakses air minum	√	√		23,96	29,40	29,16	35,02	35,02	36,77	26,80	30,10	31,84	33,00	33,70	34,54	111,85	12,38	109,19	94,23	96,23	93,94
5	% RT berakses sanitasi	√	√		64,22	65,79	67,59	60,14	63,15	66,31	47,80	49,28	57,28	57,35	57,88	58,86	74,43	74,91	84,75	95,36	91,65	88,76
6	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik			√	46,50	53,60	49,00	72,89	71,05	71,06	52,30	63,40	69,40	71,05	71,05	71,72	112,47	118,28	141,63	97,48	100	100,93

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Renstra PD Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	% penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan		√		-	-	-	-	10,40	10,40	-	-	-	-	11,76	17,86	0	0	0	0	113,08	171,73

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)	(19)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran	4.009.936.800	408.344.500	372.004.500	428.359.500	495.926.000	476.462.000	3.665.019.286	320.826.318	326.796.565	346.868.438	375.895.651	416.819.919	91,40	78,57	87,85	80,98	75,80	87,48	(0,14)	(0,13)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.129.484.400	3.494.437.550	6.193.608.000	1.774.848.250	315.450.000	409.250.000	2.076.807.436	3.382.710.838	5.684.973.649	1.651.565.904	298.594.748	342.087.837	97,53	96,80	91,79	93,05	94,66	83,59	(0,03)	(0,07)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.850.000	-	-	21.400.000	-	-	18.676.000	-	-	21.362.900	-	-	99,08	#DIV/0!	#DIV/0!	99,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	74.975.000	110.075.000	67.200.000	75.000.000	131.920.000	27.899.900	21.425.000	62.929.020	49.436.495	44.033.000	64.051.580	55,80	28,58	57,17	73,57	58,71	48,55	0,17	0,46
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	19.424.500	19.500.000	25.999.900	27.500.000	27.500.000	15.000.000	19.424.500	19.500.000	25.999.900	25.031.451	27.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	91,02	100,00	0,17	0,20
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-	32.108.056.000	-	-	-	-	-	32.002.614.650	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	349.959.785	499.075.000	509.684.400	391.470.871	-	-	333.784.250	496.392.000	497.847.500	389.596.500	-	-	95,38	99,46	97,68	99,52	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,20)	(0,24)
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	350.000.000	213.350.000	111.778.000	-	-	-	304.395.000	211.110.000	98.703.000	-	-	-	86,97	98,95	88,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7.007.786.000	9.831.970.000	26.515.404.550	16.180.000.000	-	-	6.952.466.500	9.746.809.800	26.031.779.689	16.136.536.758	-	-	99,21	99,13	98,18	99,73	#DIV/0!	#DIV/0!	0,18	0,23
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9.864.721.400	31.189.405.500	29.844.767.300	-	-	-	9.698.920.700	30.731.822.850	29.565.534.500	-	-	-	98,32	98,53	99,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	2.041.425.000	-	-	-	-	-	2.034.364.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	-	-	-	20.593.052.400	14.943.901.787	-	-	-	-	19.967.060.756	14.665.866.877	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,96	98,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2.130.825.000	-	-	-	-	-	912.506.150	-	-	-	-	-	42,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU	-	6.385.74 4.550	9.254.68 3.850	9.979.41 0.685	-	-	-	6.024.41 0.320	8.147.46 4.458	9.136.96 0.043	-	-	#DIV/0!	94,34	88,04	91,56	#DIV/0! !	#DIV/0!	#DIV/0! !	#DIV/0!	
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	-	117.032. 000	433.240. 000	235.495. 000	-	-	-	79.039.0 00	333.900. 500	213.363. 500	-	-	#DIV/0!	67,54	77,07	90,60	#DIV/0! !	#DIV/0!	#DIV/0! !	#DIV/0!	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	4.392.26 2.850	8.791.34 2.800	3.795.38 6.000	24.246.3 90.000	-	15.533.1 53.500	4.105.16 2.850	7.721.37 2.850	3.385.77 7.643	23.196.4 58.323	-	14.559.2 25.910	93,46	87,83	89,21	95,67	#DIV/0! !	93,73	1,21	1,72	
Program Pengembangan Perumahan	251.718. 500	1.025.55 4.000	3.785.67 5.400	411.785. 000	2.944.01 7.650	3.187.25 0.550	174.471. 400	901.140. 200	3.684.55 8.859	342.391. 212	2.799.30 9.857	3.128.55 2.381	69,31	87,87	97,33	83,15	95,08	98,16	2,76	4,51	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	13.618.8 17.500	8.466.39 7.750	12.458.4 16.000	12.937.0 56.000	-	-	13.221.7 52.900	8.407.48 6.950	12.279.3 70.300	12.773.7 99.634	-	-	97,08	99,30	98,56	98,74	#DIV/0! !	#DIV/0!	(0,22)	(0,29)	
Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	14.345.4 85.000	19.774.1 27.000	-	-	-	-	-	13.851.6 67.888	19.302.1 19.589	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,56	97,61	#DIV/0! !	#DIV/0!
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	-	-	-	65.650.0 00	-	-	-	-	-	36.861.0 00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! !	56,15	#DIV/0! !	#DIV/0!	
Program Penataan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	2.663.00 0.000	1.394.57 3.000	-	-	-	-	2.522.69 3.038	1.144.22 9.115	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,73	82,05	#DIV/0! !	#DIV/0!	

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Program pengelolaan areal pemakaman	875.000.000	667.912.500	1.199.413.500	4.748.738.000	2.569.000.000	-	845.019.050	560.237.500	1.188.038.700	4.734.066.300	2.557.418.000	-	96,57	83,88	99,05	99,69	99,55	#DIV/0!	0,76	1,10
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.000.000.000	4.489.272.115	4.866.587.750	1.785.179.000	-	-	2.910.754.500	4.456.322.250	4.799.888.750	1.775.132.000	-	-	97,03	99,27	98,63	99,44	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,26)	(0,34)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	-	-	-	580.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	-	49.625.000	55.000.000	-	-	-	-	16.818.495	37.456.995	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33,89	68,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Tata Ruang	744.871.000	503.614.000	1.070.249.000	96.550.000	-	-	723.678.300	472.611.500	964.366.187	95.645.259	-	-	97,15	93,84	90,11	99,06	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,28)	(0,40)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.099.917.500	785.242.000	-	-	-	-	1.029.703.730	306.836.200	-	-	-	-	93,62	39,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengelolaan dan Pengembangan Taman	1.631.683.500	-	-	-	-	-	1.487.375.200	-	-	-	-	-	91,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

Dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 856.414 jiwa pada Tahun 2018, tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk semakin besar mengingat jumlah sumber daya alam sangat terbatas. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase. Masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih dan sanitasi menjadi peluang agar target peningkatan akses prasarana dasar dapat tercapai. Untuk mempercepat perwujudan kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL), khususnya di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum.

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang melakukan sinkronisasi dan sinergisitas dengan Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi maupun Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Ini dilaksanakan demi tercapainya keselarasan antara program-program yang dilaksanakan oleh pusat, provinsi, maupun daerah. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Komparasi Perubahan Capaian Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang (%)	Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten sampang	Sasaran pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K/L
1	Persentase rumah layak huni	57,94	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	<p>Pengembangan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya jumlah backlog perumahan - Meningkatnya pembangunan Rusunawa - Meningkatnya jumlah renovasi RTLH - Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman (Pembangunan PSU), dan kawasan khusus - Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan - Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi - Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM perkotaan, PPIP Perdesaan - Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman - Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman - Meningkatnya kualitas gedung Negara - Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama bidang keciptaan karya <p>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air. 	Meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat
2.	Persentase kawasan kumuh	0,108			

No	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang (%)	Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten sampang	Sasaran pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K/L
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan - Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi -Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah - Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur bidang keciptakaryaan - Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematas air hujan -Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase -Meningkatnya sarana prasarana persampahan - Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah Sasaran Penataan Ruang - Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang - Meningkatkan Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi - Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 	

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kab. Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan DPRKP Kab. Sampang. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi,

dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang di dalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2013 s/d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	57,94%	Proposal dan dokumen-dokumen pendukung	Kurangnya SDM yg menangani	1. Proposal yg masuk ke Dinas belum maksimal 2. Kurangnya koordinasi antara warga yg membutuhkan bantuan dengan pihak terkait	Koordinasi dengan pihak terkait dengan SDM yg ada belum optimal
- Belum terpenuhinya tujuh (7) indikator penanganan permukiman kumuh: 1. Sanitasi; 2. Proteksi kebakaran; 3. Drainase; 4. Jalan; 5. Persampahan; 6. Air bersih; 7. RTLH/Tata bangunan/tata ruang.	0,108%	1. Permen PUPR No.2 tahun 2016 tentang peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2. Perbup tentang penetapan lokasi permukiman kumuh tahun 2017 dan diperbarui tahun 2018.	1. Penanganan masih sektoral dan hanya di sektor jalan dan drainase sesuai dengan tupoksi yang ada; 2. Belum tersedianya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.	1. Kurangnya partisipasi masyarakat; 2. Kurangnya koordinasi antar SKPD yang menangani kawasan kumuh.	1. Sosialisasi tentang penataan permasalahan kawasan kumuh; 2. Koordinasi antar sektor yang terkait penanganan kawasan kumuh; 3. Evaluasi tupoksi.
- Belum optimalnya pelayanan dan ketersediaan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air	34,54%	Proposal/ pengajuan PDAM	Kurangnya SDM yg menangani	1. Keterbatasan lahan 2. Minimnya sumber air	Koordinasi dengan masyarakat belum optimal

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang dimasa lima tahun mendatang adalah :

Tabel 3.1.2.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Target MDG's Di sektor air minum dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di perumahan dan permukiman	Target MDGs akan kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat	
		Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) memberikan keleluasaan daerah untuk meningkatkan pembangunan sebagai wujud dari partisipasi publik	Adanya peraturan yang menunjang otonomi daerah	
		Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program	Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024.

Tabel 3.2.1.
Telaahan Visi, Misi serta Permasalahan Pelayanan DPRKP

Visi : Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan	1. Adanya ketidakpercayaan sebagian	1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) memberikan keleluasaan
1	Program pengembangan perumahan			
2	Program penataan kawasan permukiman			

Visi : Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman	2. Adanya ego sektoral dan antar level pemerintahan yang menyebabkan sulitnya koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya	masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka	daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik
4	Program pengelolaan pertanahan		2. Koordinasi yang lemah dengan badan resmi penyedia data.	2. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
5	Program-program Administrasi Umum	3. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	3. Kepentingan politik pragmatis yang tidak selaras dengan kebutuhan sarana dan prasarana	3. Adanya dukungan dari lembaga lain/organisasi negeri maupun swasta dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program
			4. Masih adanya apriori terhadap partisipasi publik oleh lembaga dan pelaku birokrasi	4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
				5. Terbukanya kesempatan bagi peningkatan kapasitas SDM melalui bintek dan diklat keahlian

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Permasalahan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat	Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat	1. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir 2. Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi	Adanya peraturan yang mengamanatkan atas pelaksanaan pekerjaan

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 3.3.2.
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bidang Perumahan 1. Menurunnya jumlah backlog perumahan 2. Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni 3. Meningkatnya pembangunan Rusunawa 4. Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus 6. Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana dikawasan agropolitan 7. Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bisang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi 8. Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM Perkotaan dan PPIP Perdesaan 9. Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman 10. Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan bangunan perumahan dan permukiman 11. Meningkatnya kualitas gedung negara. 12. Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur	1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau; 2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan; 3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST & Kawasan permukiman perdesaan	Kondisi politik dalam pengambilan keputusan pada perencanaan sehingga berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan	Adanya peraturan yang mengamanatkan cara perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terutama di bidang keciptakaryaan.			
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan 3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum	Keterbatasan lahan	Debit air kurang	Program pemerintah menciptakan penyediaan air minum
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 1. Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah 2. Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur bidang keciptakaryaan 3. Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematas air hujan 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan drainase 5. Meningkatkan sarana prasarana persampahan 6. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan pengelolaan MCK yang disediakan kurang optimal	Ketersediaan air untuk MCK kurang	Program pemerintah menciptakan sanitasi

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang yang harus ditindaklanjuti, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPRKP	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing dinas terkait	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum optimalnya pencapaian target pada indikator kinerja “persentase kawasan kumuh” secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada DPRKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

Isu internasional terkait dengan air diantaranya adalah:

- a) Pencapaian target MDG's untuk sektor air minum dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
- b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MDG's) bahwa program pengelolaan sumber daya air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan.

Isu strategis infrastruktur:

- a). Percepatan pembangunan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan IMB.
- b). Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
- c). Ketersediaan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase kurang optimal dan masih tingginya persentase kawasan kumuh di Kab. Sampang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi 1 Bupati Sampang memiliki tujuan sebagai berikut:

“ Terbangunnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing “

Adapun penjabaran atas tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%) TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman dan permukiman	1. Persentase perumahan dan permukiman sehat	1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	1. Persentase rumah layak huni	57,96	57,97	57,99	58,01	58,03	58,05
				2. Persentase kawasan kumuh	0,106	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097
				3. Nilai Sakip DPRKP Kab. Sampang	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang tahun anggaran 2019-2024. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Bupati Kabupaten Sampang maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang mempunyai strategi dan arah kebijakan 5 Tahun kedepan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Sampang Hebat Bermartabat			
MISI : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya akses prasarana dasar permukiman dan perumahan	1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan persentase rumah layak huni;	1. Pengembangan perumahan dengan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan rumah tidak layak huni (RTLH);
		2. Menurunkan persentase kawasan kumuh	2. Pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan dengan pembangunan SPAM dan sanitasi;
			3. Penataan kawasan permukiman dengan pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman.

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Inovasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang untuk revitalisasi/memfungsikan kembali instalasi pengelolaan air SWRO Mandangin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga dapat meningkatkan akses air minum dan sanitasi masyarakat, disamping mendukung program pengembangan ekonomi dan wisata Pulau Mandangin. SWRO sendiri merupakan sistem penyulingan/pengolahan air laut dengan memanfaatkan teknologi membran, yang akan mengolah air laut (air asin) menjadi air tawar yang siap minum.

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi DPRKP Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Adanya kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan DPRKP secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kuantitas SDM aparat di bidang teknik masih kurang 2 Keterbatasan SDM
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan • Meningkatkan kualitas hasil pembangunan sesuai tugas dan fungsi DPRKP • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan SDM bidang teknik baik dari segi kuantitas dan kualitas</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase perumahan dan permukiman sehat b. Persentase rumah layak huni c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 	<p>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan • Meningkatkan koordinasi tiap bidang

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang sebagai badan perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra ini.

Dalam merancang program dan kegiatan selama tahun 2019-2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang merencanakan 8 program dan 19 kegiatan. Tentunya program dan kegiatan ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran yang telah mengacu pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan yang dirumuskan di Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang. Hal ini dilaksanakan demi menjamin konsistensi dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang sebagai satuan unit SKPD dan visi-misi Kepala Daerah terpilih dapat tercapai.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
		th. 2018	th. 2019	th. 2020	th. 2021	th. 2022	th. 2023	
T.1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
IT. 2	Angka kemiskinan	21,21	19,76	18,64	17,34	15,94	14,25	12,51
S.4	Meningkatnya Akses Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman							
IS.5	Persentase perumahan dan permukiman sehat	52,03	55,78	60,06	64,35	68,63	72,91	77,19

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 1 (satu) indikator sasaran RPJMD yang kemudian akan menjadi bagian dari pencapaian target RPJMD dalam rangka mewujudkan visi-misi kepala daerah. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD beserta kegiatannya.

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang, telah jelas arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis ini memuat gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sampang, Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Pendanaan Indikatif, serta indikator kinerja dengan memperhatikan RPJMD Kab. Sampang dalam kerangka sinkronisasi pembangunan.

Berpedoman pada RPJMD yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah, maka diperlukan penjabaran lebih operasional ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dengan mengacu pada Renstra SKPD yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian proses pembangunan dilaksanakan berdasarkan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJM ini juga merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.

Dalam Renstra ini dilakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan program dan kegiatan, yaitu (i) merancang kegiatan dengan kinerja yang terukur, dan (ii) merancang kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam jangka menengah. Pendekatan ini diperlukan ketajaman dalam menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut.

Selanjutnya, dalam merancang arah kebijakan ke depan, harus benar-benar dapat menunjukkan kebijakan-kebijakan yang bernilai strategis. Ini tidak berarti ada yang ditinggalkan, namun harus disadari bahwa dengan kemampuan pendanaan yang terbatas, harus mampu memiliki prioritas yang lebih tajam.

Dengan demikian, diharapkan Renstra berisi kebijakan yang implementatif, yang memuat *action plan* yang jelas sasarannya, jelas pula jumlah biaya yang dibutuhkan dan akan tercapai keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan dimasa mendatang.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAJDI

**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SAMPANG**

Sasaran RPJMD/Sasaran Renstra			Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
No.	Uraian	Indikator Kinerja				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sasaran RPJMD:																							
1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar	1. Persentase rumah layak huni	√	√		61,92	63,76	65,76	47,67	48,62	49,59	47,61	47,67	47,67	47,67	47,68	47,71	76,89	74,76	72,49	100	98,07	96,21
		2. Persentase permukiman kumuh	√	√		28,38	27,39	26,50	17,10	16,93	16,59	17,48	17,43	17,28	17,28	0,94	1,06	61,59	63,64	65,21	101,05	5,55	6,39
Sasaran Renstra:																							
1	Meningkatnya perumahan sehat dan layak huni	1. Cakupan perumahan sehat yang didukung PSU	√			0	26,50	26,50	45,00	16,00	20,00	0	12,47	12,47	14,55	16,00	37,33	#DIV/0!	47,06	47,06	32,33	100	186,65
		2. % RT berakses air minum	√	√		23,96	29,40	29,16	35,02	35,02	36,77	26,8	30,10	31,84	33,00	33,70	34,54	111,85	102,38	109,19	94,23	96,23	93,94
		3. % RT berakses sanitasi	√	√		64,22	65,79	67,59	60,14	63,15	66,31	47,8	49,28	57,28	57,35	57,88	58,86	74,43	74,91	84,75	95,36	91,65	88,76
		4. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik			√	46,50	53,60	49,00	72,89	71,05	71,06	52,3	63,40	69,4	71,05	71,05	71,72	112,473	118,28	141,63	97,48	100	100,93
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Pertanahan	1. % luas lahan bersertifikat		√		-	7	10,19	10,39	10,39	10,40	-	7,00	10,19	10,39	10,39	10,40	-	100	100	100	100	100
		2. % penyelesaian pengaduan masyarakat		√		-	-	-	-	10,40	10,40	58,33	-	-	-	11,76	17,86	-	-	-	-	113,08	171,73
PROGRAM :																							
1	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	√			-	-	26,50	45,00	55,00	57,75	-	42,86	42,86	50	50	26,09	#VALUE!	#VALUE!	161,74	111,11	90,91	45,18

	- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Program Lingkungan Sehat Perumahan																							
8	Program pengembangan dan pengelolaan air <i>Khuhus keg. SPAM</i>	Cakupan pemasangan layanan SPAM			√	23,96	29,40	29,16	35,02	18,00	19,00	-	-	-	17,30	18,00	19,00	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	49,40	100	100	
9	Program Penyelesaian Konflik	% Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab		√						20,00	25,00	51,26	52,07	53,62	54,92	20,00	25,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang berpakaian Dinas sesuai dengan Aturan				100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yg Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur				100	100	100	100	43	43	41	43	63	50	55	32	41	43	63	50	129,25	74,78	
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Kinerja Tepat Waktu				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)	(19)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran	4.009.936.800	408.344.500	372.004.500	428.359.500	495.926.000	476.462.000	3.665.019.286	320.826.318	326.796.565	346.868.438	375.895.651	416.819.919	91,40	78,57	87,85	80,98	75,80	87,48	(0,14)	(0,13)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.129.484.400	3.494.437.550	6.193.608.000	1.774.848.250	315.450.000	409.250.000	2.076.807.436	3.382.710.838	5.684.973.649	1.651.565.904	298.594.748	342.087.837	97,53	96,80	91,79	93,05	94,66	83,59	(0,03)	(0,07)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.850.000	-	-	21.400.000	-	-	18.676.000	-	-	21.362.900	-	-	99,08	#DIV/0!	#DIV/0!	99,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	74.975.000	110.075.000	67.200.000	75.000.000	131.920.000	27.899.900	21.425.000	62.929.020	49.436.495	44.033.000	64.051.580	55,80	28,58	57,17	73,57	58,71	48,55	0,17	0,46
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	19.424.500	19.500.000	25.999.900	27.500.000	27.500.000	15.000.000	19.424.500	19.500.000	25.999.900	25.031.451	27.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	91,02	100,00	0,17	0,20
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-	32.108.056.000	-	-	-	-	-	32.002.614.650	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	349.959.785	499.075.000	509.684.400	391.470.871	-	-	333.784.250	496.392.000	497.847.500	389.596.500	-	-	95,38	99,46	97,68	99,52	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,20)	(0,24)
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	350.000.000	213.350.000	111.778.000	-	-	-	304.395.000	211.110.000	98.703.000	-	-	-	86,97	98,95	88,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7.007.786.000	9.831.970.000	26.515.404.550	16.180.000.000	-	-	6.952.466.500	9.746.809.800	26.031.779.689	16.136.536.758	-	-	99,21	99,13	98,18	99,73	#DIV/0!	#DIV/0!	0,18	0,23
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9.864.721.400	31.189.405.500	29.844.767.300	-	-	-	9.698.920.700	30.731.822.850	29.565.534.500	-	-	-	98,32	98,53	99,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	2.041.425.000	-	-	-	-	-	2.034.364.500	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	-	-	-	20.593.052.400	14.943.901.787	-	-	-	-	19.967.060.756	14.665.866.877	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,96	98,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2.130.825.000	-	-	-	-	-	912.506.150	-	-	-	-	-	42,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU	-	6.385.744.550	9.254.683.850	9.979.410.685	-	-	-	6.024.410.320	8.147.464.458	9.136.960.043	-	-	#DIV/0!	94,34	88,04	91,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	-	117.032.000	433.240.000	235.495.000	-	-	-	79.039.000	333.900.500	213.363.500	-	-	#DIV/0!	67,54	77,07	90,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)	(19)	(17)	(18)
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	4.392.262.850	8.791.342.800	3.795.386.000	24.246.390.000	-	15.533.153.500	4.105.162.850	7.721.372.850	3.385.777.643	23.196.458.323	-	14.559.225.910	93,46	87,83	89,21	95,67	#DIV/0!	93,73	1,21	1,72
Program Pengembangan Perumahan	251.718.500	1.025.554.000	3.785.675.400	411.785.000	2.944.017.650	3.187.250.550	174.471.400	901.140.200	3.684.558.859	342.391.212	2.799.309.857	3.128.552.381	69,31	87,87	97,33	83,15	95,08	98,16	2,76	4,51
Program Lingkungan Sehat Perumahan	13.618.817.500	8.466.397.750	12.458.416.000	12.937.056.000	-	-	13.221.752.900	8.407.486.950	12.279.370.300	12.773.799.634	-	-	97,08	99,30	98,56	98,74	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,22)	(0,29)
Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	14.345.485.000	19.774.127.000	-	-	-	-	13.851.667.888	19.302.119.589	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,56	97,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	-	-	-	65.650.000	-	-	-	-	-	36.861.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penataan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	2.663.000.000	1.394.573.000	-	-	-	-	2.522.693.038	1.144.229.115	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,73	82,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Program pengelolaan areal pemakaman	875.000.000	667.912.500	1.199.413.500	4.748.738.000	2.569.000.000	-	845.019.050	560.237.500	1.188.038.700	4.734.066.300	2.557.418.000	-	96,57	83,88	99,05	99,69	99,55	#DIV/0!	0,76	1,10
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.000.000.000	4.489.272.115	4.866.587.750	1.785.179.000	-	-	2.910.754.500	4.456.322.250	4.799.888.750	1.775.132.000	-	-	97,03	99,27	98,63	99,44	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,26)	(0,34)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	-	-	-	580.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	-	-	49.625.000	55.000.000	-	-	-	-	16.818.495	37.456.995	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33,89	68,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Tata Ruang	744.871.000	503.614.000	1.070.249.000	96.550.000	-	-	723.678.300	472.611.500	964.366.187	95.645.259	-	-	97,15	93,84	90,11	99,06	#DIV/0!	#DIV/0!	(0,28)	(0,40)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.099.917.500	785.242.000	-	-	-	-	1.029.703.730	306.836.200	-	-	-	-	93,62	39,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengelolaan dan Pengembangan Taman	1.631.683.500	-	-	-	-	-	1.487.375.200	-	-	-	-	-	91,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

VISI : Sampang Hebat Bermartabat
 MISI : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 Tujuan : Terbangunnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (Akumulasi dari 2019 s/d. 2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
								2019		2020		2021		2022		2023				2024		Target	Rp.	
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Kinerja	Rp.			Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)	
Tujuan 1:																								
Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman	Persentase perumahan dan permukiman sehat	Sasaran 1: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman	1. Persentase rumah layak huni	1.04.1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan perumahan yang sehat yang didukung PSU	52,03 %	55,78	60,06	64,35	68,63	72,91	77,19	77,19	67.697.636.939	DPRKP Kab. Sampang								
						Persentase penyediaan rumah layak huni	39,13 %	39,13	43,48	47,83	47,83	52,17	52,17	52,17	52,17	67.697.636.939								
							2,56 %	2,59	2,63	2,67	2,71	2,75	2,80	2,80	2,80									
					1.04.1.04.01.15.01	Fasilitasi dan pengelolaan pengembangan perumahan	Jumlah PSU yang dibangun	12 perumahan	9	3.329.280.000	10	3.572.110.000	11	3.575.000.000	11	3.575.000.000	12	3.932.500.000	12	4.325.750.000	12	22.309.640.000		
							Jumlah RTLH yang direhab	270 rumah	35	40	45	50	50											
							Jumlah sosialisasi tentang perumahan	6 sosialisasi	2	1	1	1	1											
							1.04.1.04.01.15.02	Fasilitasi tata bangunan	Jumlah sosialisasi penataan bangunan dan gedung yang baik	6 sosialisasi	2	9.560.630.000	1	5.725.791.673	1	6.113.674.752	1	7.631.892.574	1	7.758.727.555	1	8.597.280.385	1	45.387.996.939
									Jumlah pengawasan penyelenggaraan dan keberadaan tower telekomunikasi	168 tower	168	168	168	168										
									Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang bangunan gedung	3 dokumen	1	-	-	1	-	1								
									Jumlah dokumen HSBGN	6 dokumen	1	1	1	1	1									
					Jumlah rehab/pemeliharaan tugu batas wilayah di Kab. Sampang	2 lokasi	2	2	2	2	2	2												
					Jumlah pembangunan gedung milik negara	10 gedung	2	2	2	2	2	2												
					2.04.1.04.15.	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan	17,86 %	26,67	36,67	46,67	56,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	2.281.250.000				
					2.04.1.04.15.01.	Fasilitasi dan pengelolaan pertanahan	Jumlah penyuluhan/sosialisasi hukum pertanahan	12 kali	2	87.875.000	2	398.675.000	2	448.675.000	2	448.675.000	2	448.675.000	2	448.675.000	2	2.281.250.000		
							Jumlah penyelesaian/fasilitasi permasalahan sengketa tanah milik Pemkab	36 penyelesaian	6	6	6	6	6											
2.04.1.04.01.16.	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	42,13 %	43,91	46,91	49,92	52,93	55,98	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	61.538.503.617									
		Persentase drainase dalam kondisi baik	43,25 %	43,78	46,14	48,50	50,86	53,21	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (Akumulasi dari 2019 s/d. 2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023		2024				Target	Rp.
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)
				1.04.1.04.01.16.01	Pembangunan/penataan sarana dan prasarana infrastruktur	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	30,01 km	3,01	4.795.913.000	3	4.900.000.000	3	3.500.000.000	3	3.500.000.000	3	3.500.000.000	3	3.500.000.000	3	23.695.913.000		
						Jumlah drainase yang dibangun	8,30 km	0,3		1		1		1		1		1		1			
						Jumlah dokumen dan review SID jalan dan drainase	2 dokumen	1		-		-		-		1		-		-			
				1.04.1.04.01.16.02	Pengelolaan penataan lingkungan	Jumlah perencanaan penataan kawasan kumuh	2 dokumen	1	2.064.950.000	-	4.770.691.313	-	6.412.648.251	1	6.394.268.340	-	6.511.924.881	-	7.188.107.832	-	33.342.590.617		
						Jumlah pembangunan infrastruktur kawasan kumuh	58,23 Ha	6,35		9,13		10,03		10,25		10,78		11,69		11,69			
				1.04.1.04.01.16.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kawasan permukiman	0,60 km	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	4.500.000.000		
						Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong kawasan permukiman	8,40 km	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1			
				1.04.1.04.01.17.	Program Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan	Persentase RT berakses air minum	43,55 %	44,28	38.430.744.450	45,00	33.593.673.640	45,72	35.009.696.701	46,44	41.462.402.653	47,16	42.115.961.529	47,88	45.872.024.428	47,88	236.484.503.401		
						Persentase RT berakses sanitasi	64,52 %	65,20		65,92		66,64		67,36		68,08		68,80		68,80			
				1.04.1.04.01.17.01	Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi	Jumlah SPAM, pengembangan sarana air minum dan sanitasi permukiman, sumur bor, instalasi perpipaan dan menara air <i>sw</i> dibangun	9.825 RT	2025	18.138.356.000	1.500	21.093.673.640	1.700	22.159.696.701	1.900	25.492.402.653	2.100	25.995.961.529	2.300	28.077.024.428	2.300	140.957.114.951		
				1.04.1.04.01.17.02	Penyehatan lingkungan	Jumlah pembangunan lingkungan sehat perumahan dan permukiman	7.500 RT	1875	18.465.757.850	1625	10.000.000.000	1.000	10.335.000.000	1.000	13.175.000.000	1.000	13.175.000.000	1.000	14.220.000.000	1.000	79.370.757.850		
				1.04.1.04.01.17.03	Operasional dan pemeliharaan	Jumlah operasional dan pemeliharaan	750 RT	125	1.826.630.600	125	2.500.000.000	125	2.515.000.000	125	2.795.000.000	125	2.945.000.000	125	3.575.000.000	125	16.156.630.600		
				1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100	483.705.000	100	438.058.184	100	454.074.258	100	529.906.572	100	494.988.777	100	521.667.591	100	2.922.400.382		
				1.04.1.04.01.01.01	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3.750 Surat terkirim	750	191.855.000	750	198.058.184	750	200.074.258	750	229.906.572	750	196.988.777	750	214.667.591	750	1.231.550.382		
						Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	3		3		3		3		3		3		3			
						Jumlah penyediaan pemeliharaan kebersihan kantor	20 Jenis	20		20		20		20		20		20		20			
						Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39 unit	39		39		39		39		39		39		39			
				1.04.1.04.	Penyediaan	Jumlah penyediaan ATK	34 macam	34	89.150.000	34	90.000.000	34	94.000.000	34	120.000.000	34	118.000.000	34	122.000.000	34	633.150.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (Akumulasi dari 2019 s/d. 2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
								2019		2020		2021		2022		2023				2024		Target	Rp.		
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Kinerja	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)		
				01.01.02	sarana administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2		2		2		2		2		2		2					
						Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9		9		9		9		9		9		9					
						Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2		2		2		2		2		2		2					
						Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2 jenis	2		2		2		2		2		2		2					
				1.04.1.04.01.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	348 OK	58	202.700.000	58	150.000.000	58	160.000.000	58	180.000.000	58	180.000.000	58	185.000.000	58	1.057.700.000				
				1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100	257.490.000	100	260.000.000	100	275.000.000	100	570.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	2.112.490.000				
				1.04.1.04.01.02.01	Pembangunan/rehab/pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 + 2 unit + unit partisi	7 + 1	114.000.000	7	80.000.000	7	84.000.000	7 + 1	330.000.000	7	90.000.000	7	110.000.000	7	808.000.000				
				1.04.1.04.01.02.03	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5 + 14 unit	14	55.240.000	14	90.000.000	14	95.000.000	2 + 14	125.000.000	14	110.000.000	3 + 14	175.000.000	14	650.240.000				
				1.04.1.04.01.02.04	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3	88.250.000	3	90.000.000	3	96.000.000	3	115.000.000	3	150.000.000	3	115.000.000	3	654.250.000				
						Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 unit	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
						Jumlah pengadaan meubelair	25 unit	4		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5				
						Jumlah pengadaan alat studio	20 unit	9		2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2				
				1.04.1.04.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	31,82 %	100	115.350.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	575.350.000				
				1.04.1.04.01.03.01	Pelaksanaan Bintek/sosialisasi/seminar dan Diklat yang diikuti	Jumlah Bintek/sosialisasi/seminar dan Diklat yang diikuti	228 OK	41	115.350.000	41	80.000.000	41	80.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	41	575.350.000				
				1.04.1.04.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	295.000.000				
				1.04.1.04.01.04.01	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rilisasi kinerja	15 laporan	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	17.500.000	3	92.500.000				
						Jumlah penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10 semester	2		2		2		2		2		2		2					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (Akumulasi dari 2019 s/d. 2024)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
								2019		2020		2021		2022		2023				2024		Target	Rp.
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Kinerja	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)
						Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5 laporan	1		1		1		1		1		1		1			
						Jumlah penyusunan SAKIP dan LKjIP	10 dokumen	2		2		2		2		2		2		2			
				1.04.1.04.01.04.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD	15 dokumen	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	17.500.000	3	92.500.000		
						Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	1		-		-		-		-		-		-			
				1.04.1.04.01.04.03	Peningkatan pelayanan informasi publik	Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	10 kegiatan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	110.000.000		
						J U M L A H			59.920.937.450		54.533.999.810		56.663.768.962		65.012.145.139		66.012.777.742		71.763.505.236		373.907.134.339		

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019

harusnya tdk ada kegiatan 2018

Tabel 7.2.
Keterhubungan Renstra DPRKP Kab. Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KINERJA RPJMD											
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Tujuan: Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing											
Sasaran: Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman	1	Persentase perumahan dan permukiman sehat	%	52,03	55,78	60,06	64,35	68,63	72,91	77,19	77,19
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH											
Tujuan: Meningkatnya akses prasarana dasar perumahan dan permukiman	1	Persentase perumahan dan permukiman sehat	%	52,03	55,78	60,06	64,35	68,63	72,91	77,19	77,19
Sasaran: Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	1	Persentase rumah layak huni	%	57,94	57,96	57,97	57,99	58,01	58,03	58,05	58,05
	2	Persentase kawasan kumuh	%	0,108	0,106	0,105	0,103	0,101	0,099	0,097	0,097
	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	%	62,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber: DPRKP Kab. Sampang, 2019